



## **PERAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMODERASI PENGARUH CEO *POWER*, PENGUNGKAPAN ESG, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Luthfia Nadaa Hidayat<sup>1</sup>, Vinola Herawaty<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Trisakti

[luthfianadaa21@gmail.com](mailto:luthfianadaa21@gmail.com), [vinola.herawati@trisakti.ac.id](mailto:vinola.herawati@trisakti.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dengan pengaruh CEO *power*, pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Analisis data yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda dengan data yang dianalisis menggunakan sampel perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, tidak termasuk sampel yang sudah di outlier, sehingga diperoleh 145 sampel yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dari pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance*, dan pengaruh negatif dari kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*, adapun CEO *power* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun interaksi *Good Corporate Governance* tidak terbukti memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* dan tidak terbukti memperlemah pengaruh CEO *power* terhadap *tax avoidance*. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memiliki tata kelola yang baik dalam perusahaan untuk mengendalikan kebijakan strategis, termasuk kebijakan terkait perpajakan sehingga memberikan nilai yang berkelanjutan kepada pemangku kepentingan

perusahaan.

**Keywords:** Good Corporate Governance; Tax avoidance; CEO Power, Pengungkapan ESG

### Abstract

This study aims to examine the moderating role of Good Corporate Governance on the impact between CEO power, ESG disclosure, and financial performance on Tax avoidance with firm size as a control variable. Using multiple linear regression analysis, this research analyses data from 145 consumer non-cyclicals companies, the sample was selected using purposive sampling, excluding outlier samples listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. The results indicate there is a positive effect of ESG disclosure on Tax avoidance and a negative effect of financial performance on Tax avoidance. CEO power and GCG has no significant effect on Tax avoidance. The interaction of Good Corporate Governance is not proven to strengthen the negative influence of ESG disclosure and financial performance on Tax avoidance and is not proven to weaken the influence of CEO power on Tax avoidance. This study highlights the importance of effective Corporate Governance in controlling strategic policies, including taxation, to provide sustainable value to stakeholders.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance; Tax avoidance; CEO Power; ESG Disclosure

### PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah aktivitas legal yang dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan guna meminimalkan kewajiban pajak. Meskipun praktik ini dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, hal ini juga dapat merugikan negara dengan menurunkan potensi penerimaan pajak. Ruang lingkup penghindaran pajak mencakup subjek dan objek, di mana subjek meliputi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Objek penghindaran pajak adalah penghasilan yang menambah pendapatan wajib pajak, yang memengaruhi besaran beban pajak yang harus dibayarkan (Oktiani dan Sanulika, 2024).

Tax ratio Indonesia menunjukkan tren kenaikan dari 9,11% pada 2021 menjadi 10,38% pada 2022, namun turun menjadi 10,21% pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pasca-pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan fiskal. Namun, rasio di bawah 15% dianggap tidak optimal untuk pembangunan berkelanjutan menurut rekomendasi IMF. Rendahnya tax



ratio ini dapat mengindikasikan adanya perilaku penghindaran pajak, terutama jika wajib pajak merasa beban pajak terlalu berat atau terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan optimalisasi beban pajak secara legal.

Dalam konteks ini, peran CEO menjadi krusial dalam menentukan seberapa jauh perusahaan akan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Kekuatan CEO, yang dapat diukur melalui masa jabatan (tenure), memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. CEO dengan masa jabatan panjang cenderung memiliki legitimasi dan kekuasaan yang lebih besar dalam organisasi, yang dapat digunakan untuk mendorong praktik tertentu, termasuk strategi penghindaran pajak. Namun, hubungan ini tidak selalu negatif; CEO yang kuat juga dapat memilih untuk memprioritaskan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social responsibility*). Penelitian oleh Zunianto dkk. (2024) menunjukkan bahwa CEO *expert power* dan *prestige power* berhubungan positif dengan *Tax avoidance*.

Faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak adalah kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG telah berkembang menjadi komponen tanggung jawab sosial perusahaan dan kini menjadi faktor penting bagi para investor (Yawika dan Handayani, 2019). Perusahaan dengan kinerja ESG baik cenderung lebih transparan dan mengelola operasinya secara bertanggung jawab, sehingga kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak (Maas, 2022). Penelitian oleh Krisna dan Juliarto (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG baik lebih mungkin mematuhi undang-undang perpajakan.

Kinerja keuangan juga berperan penting dalam penghindaran pajak. Ketika keuntungan perusahaan meningkat, beban pajak yang harus dibayarkan juga bertambah. Hal ini sering kali mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi menekan dampak negatif terhadap laba bersih akibat beban pajak. Penelitian oleh Tristanti dan Aisyahurrahmi (2023) menunjukkan bahwa saat keuntungan naik, ada kecenderungan untuk melakukan *Tax avoidance*. Namun, profitabilitas tinggi juga mencerminkan manajemen aset yang efektif, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Amelia dan Purwaningsih, 2024).

*Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara CEO power, pengungkapan ESG, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak. GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran atau kesetaraan. Penerapan GCG yang efektif dapat membantu perusahaan mengendalikan kebijakan strategis termasuk perpajakan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan



(Nurlaely dan Dewi, 2023).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CEO power terhadap *Tax avoidance*; pengaruh pengungkapan ESG terhadap *Tax avoidance*; pengaruh kinerja keuangan terhadap *Tax avoidance*; serta peran GCG sebagai moderator dalam hubungan-hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* serta memberikan wawasan bagi praktisi mengenai pentingnya GCG dalam konteks perpajakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan, yang diuraikan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen) yang seringkali mengalami konflik kepentingan. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen dapat menggunakan strategi ini untuk meningkatkan laba perusahaan, yang mungkin menguntungkan mereka melalui insentif seperti bonus. Namun, praktik ini dapat menimbulkan biaya agensi bagi prinsipal, termasuk risiko hukum dan reputasi buruk. Oleh karena itu, penting bagi pemilik untuk mengawasi keputusan manajemen agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu meminimalkan konflik ini dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Nursavitri, 2023).

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi, seperti yang dijelaskan oleh Rankin et al. (2018), berfokus pada bagaimana perusahaan beroperasi dalam konteks sosial dan lingkungan. Teori ini didasarkan pada kontrak sosial yang memberikan garis besar tentang bagaimana perusahaan dapat terlibat dengan masyarakat secara positif. Pengungkapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawab terhadap isu-isu tersebut. Dengan transparansi ini, perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, sekaligus mengurangi risiko reputasi dan menarik minat pemangku kepentingan.

### **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Teori sinyal yang diungkapkan oleh Michael Spence (1973) menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi. Kinerja keuangan menjadi sinyal positif bagi pasar; perusahaan dengan laba tinggi atau arus kas stabil cenderung menarik perhatian investor. Pengungkapan informasi strategis juga membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan



pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

### **Tax avoidance**

Penghindaran pajak adalah praktik di mana wajib pajak menggunakan celah hukum dalam undang-undang perpajakan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Mardiasmo (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai usaha wajib pajak untuk membayar pajak lebih sedikit secara legal. Di Indonesia, sistem self-assessment memberi otonomi kepada wajib pajak untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri, yang dapat memfasilitasi penghindaran pajak (Astuti dan Aryani, 2016). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak; semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Oktiani dan Sanulika, 2024).

### **CEO Power**

CEO memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebagai eksekutif tertinggi, CEO dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan dan memiliki kekuatan untuk menetapkan arah strategis perusahaan. Zunianto et al. (2024) menunjukkan bahwa kekuatan CEO berhubungan positif dengan fleksibilitas dalam penyusunan kebijakan perusahaan. Kekuatan CEO mencakup berbagai sumber seperti *ownership power*, *expert power*, *prestige power*, dan *structural power* yang memengaruhi keputusan terkait perpajakan.

### **Pengungkapan ESG**

Pengungkapan ESG mencakup faktor-faktor tata kelola perusahaan, sosial, dan lingkungan yang dapat memengaruhi kapasitas perusahaan dalam menjalankan rencana bisnisnya dan menghasilkan nilai jangka panjang. OJK telah mengamanatkan emiten untuk menyampaikan laporan berkelanjutan yang mencakup informasi mengenai kinerja keuangan dan sosial. ESG dianggap penting dalam menilai kelangsungan jangka panjang investasi dalam organisasi atau perusahaan (Hendro, 2021). Penerapan prinsip-prinsip ESG dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan serta pertumbuhan berkelanjutan yang menguntungkan bagi investor dan masyarakat secara umum.

### **Kinerja Keuangan**

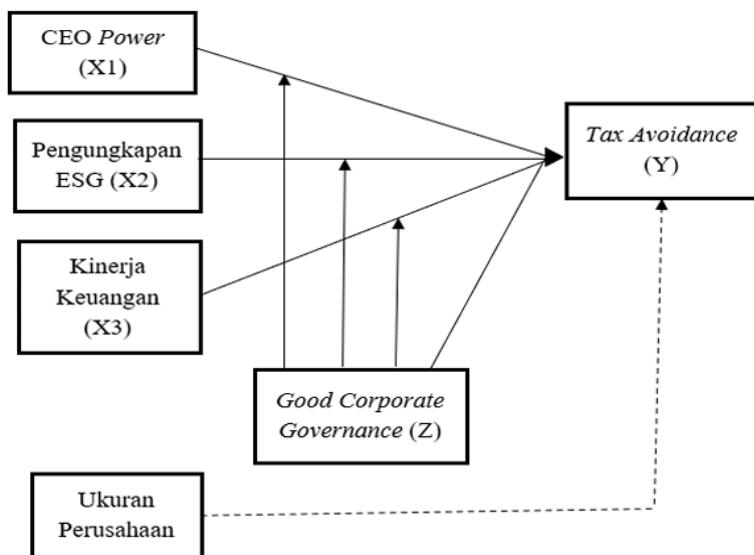
Kinerja keuangan dari sebuah perusahaan bisa menjadi acuan bagi para pengguna informasi dalam menentukan sebuah tindakan pengambilan keputusan khususnya dari segi ekonomi (Yulista & Herawaty, 2024). Kinerja keuangan dapat tercermin melalui laporan keuangan yang di1aporkan oleh perusahaan, yang nantinya 1aporan keuangan tersebut akan diperhitungkan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sehingga para pengguna informasi dapat menganalisis bagaimana kinerja keuangan dariperusahaan tersebut.



## Good Corporate Governance

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) 2009, memberikan definisi dari konsep *Good Corporate Governance* sebagai sekumpulan metode yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan sebuah perusahaan supaya operasional perusahaan berlangsung seperti apa yang diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* ialah untuk mengontrol dan dijadikan sebagai acuan untuk perusahaan supaya beroperasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ialah salah satu instrumen yang dipakai untuk melakukan penilaian *Corporate Governance*. ACGS, yang dikembangkan dengan menggunakan pedoman OECD, diharapkan mampu menciptakan peningkatan kepercayaan investor terhadap banyak perusahaan yang terdaftar di pasar modal ASEAN.

### Kerangka Konseptual



### Pengembangan Hipotesis

Secara umum, CEO mempunyai kekuasaan dalam penentuan kebijakan perusahaan, yang nantinya bisa berdampak besar dampaknya terhadap perusahaan, atau biasa disebut sebagai kekuasaan CEO. Semakin besar *power* CEO, semakin besar pula kekuasaan dan fleksibilitas dalam mengambil kebijakan perusahaan. Temuan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Zunianto, dkk (2024) juga memberitahukan bahwasanya secara empiris, CEO *power* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di Indonesia. CEO *expert power* yang diukur dengan CEO Tenure mempunyai hubungan positif dengan penghindaran pajak.

H1: CEO *Power* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Tingkat pengungkapan ESG sebuah perusahaan yang semakin tinggi akan menyebabkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab dalam pelaporan ESG cenderung memiliki komitmen lebih besar terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Temuan penelitian Oktiani & Sanulika, (2024) juga serupa dengan yang penelitian Nurlaelly & Dewi, (2023) menyatakan bahwasanya *Environmental, Social, and Governance* memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya perusahaan yang lebih peduli terhadap sejumlah persoalan sosial dan lingkungan mempunyai kecenderungan lebih rendah untuk melangsungkan penghindaran pajak.

H2: Pengungkapan ESG memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

Kinerja keuangan menggambarkan kondisi finansial perusahaan. Profitabilitas yang diukur dengan ROA merupakan rasio keuangan yang melihat seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam mendapatkan keuntungan agar bisnis berjalan dengan lancar. Tristanti dan Aisyaturrahmi (2023), memberitahukan bahwasanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah lebih suka menghindari pembayaran pajak untuk menjaga kekayaan mereka. Hal tersebut diperkuat oleh riset yang dilaksanakan oleh Sembiring dan Sa'adah (2021), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas berarti perusahaan menghasilkan cukup keuntungan untuk membayar tagihan, termasuk pajak, dan menggunakan aset secara efektif dan efisien.

H3: Kinerja Keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

*Corporate Governance* ialah sistem pengawasan dan panduan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan manajemen perusahaan. Pernyataan dari Nurlaelly dan Dewi (2023), *Corporate Governance* adalah sebuah sistem atau metode yang mengontrol dan mengatur perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate Governance* juga mengacu pada bagaimana bisnis mengikuti aturan dan standar ketika membuat pilihan sehingga kinerja bisnis dapat dilacak, dijalankan, dan dilaporkan (Putri, 2020).

H4: *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

CEO yang memiliki kekuasaan tinggi mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan, termasuk menghindari pajak secara agresif. Ketika GCG diterapkan dengan baik, dewan direksi dan komite audit dapat lebih efektif dalam mengawasi keputusan CEO dan mencegah tindakan



yang mungkin merugikan pemangku kepentingan atau melanggar hukum, termasuk praktik penghindaran pajak (Nursavitri, 2023).

H5: *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh positif CEO Power terhadap *Tax avoidance*.

Tingkat pengungkapan ESG yang perusahaan miliki mendorong perusahaan untuk menghindari menjalankan praktik penghindaran pajak. Pengungkapan ESG yang tinggi menandakan bahwasanya perusahaan tersebut berusaha memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta beroperasi dengan transparansi dan integritas. Prinsip-prinsip GCG yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perusahaan seharusnya dapat mengintegrasikan aspek etika dan kewajiban pajak, guna memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab sosial.

H6: *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh negatif Pengungkapan ESG terhadap *Tax avoidance*.

Semakin besar profitabilitas sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi dipandang sukses dalam pengelolaan manajemen dan beroperasi sesuai dengan harapan pemiliknya, Amalia dan Purwaningsih (2024). Salah satu metode implementasi sistem yang bisa menyebabkan peningkatan nilai perusahaan adalah penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yang baik, perusahaan akan terhindar dari kegiatan ilegal, termasuk yang berkaitan dengan pajak.

H7: *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh negatif Kinerja Keuangan terhadap *Tax avoidance*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji hipotesis untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel bebas, yaitu CEO Power, Pengungkapan ESG, dan Kinerja Keuangan terhadap variabel terikat, yaitu *Tax avoidance*. *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Data yang digunakan berasal dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023, dengan informasi yang diperoleh dari situs resmi dan laporan tahunan perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*, yang didefinisikan sebagai praktik wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* dinilai menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana nilai CETR yang tinggi menunjukkan penghindaran



pajak yang rendah dan sebaliknya (Oktiani dan Sanulika, 2024). Variabel independen terdiri dari *CEO Power*, yang diukur berdasarkan masa jabatan CEO, serta *Pengungkapan ESG*, yang dinilai menggunakan GRI Standards 2021 untuk mengukur dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (Ghazali et al., 2020). Kinerja Keuangan diukur dengan *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

*Good Corporate Governance* diukur menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard, dengan fokus pada pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab dewan direksi. Penelitian ini juga mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, yang diukur melalui total aset dengan menggunakan natural log untuk meminimalkan fluktuasi data.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel sesuai kriteria tertentu, menghasilkan total 54 perusahaan dan 162 data observasi. Data sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan dan sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan software IBM SPSS versi 30, dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel dan uji outlier untuk mengidentifikasi data ekstrem yang mungkin mempengaruhi hasil analisis (Ghozali, 2018).

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
<b>Tax avoidance</b>	Praktik wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak.	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) x -1
<b>CEO Power</b>	Kekuatan CEO dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan.	Masa jabatan CEO
<b>Pengungkapan ESG</b>	Tingkat transparansi perusahaan terkait dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.	GRI Standards 2021
<b>Kinerja Keuangan</b>	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.	<i>Return on Assets</i> (ROA)
<b>Good Corporate Governance</b>	Praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.	Indikator D dan E ACGS
<b>Ukuran Perusahaan</b>	Ukuran perusahaan berdasarkan total aset.	Natural log dari total asset



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, dengan kriteria tertentu. Uji outlier dilakukan untuk menghilangkan sampel yang tidak terdistribusi normal.

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI	125
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan lengkap	(40)
3	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing	(3)
4	Perusahaan yang mengalami rugi selama tahun 2021-2023	(28)
5	<b>Total Perusahaan</b>	<b>54</b>
6	Total Sampel (n x periode penelitian)	<b>162</b>
7	Pengurangan data <i>outlier</i>	(17)
8	<b>Total Sampel Penelitian</b>	<b>145</b>

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
TA	145	-0,70	-0,01	-0,2381	0,11236
CEO Tenure	145	0,00	36,00	4,5793	5,37958
ESG	145	0,16	0,91	0,4782	0,15399
ROA	145	0,49	34,33	10,4059	7,01294
GCG	145	0,69	0,93	0,8009	0,05670
SIZE	145	24,94	32,16	29,0132	1,64016

*Tax avoidance* yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum sebesar -0,70, dan nilai maksimum sebesar -0,01. Nilai rata rata dari variabel ini adalah -0,2381, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,11236.

CEO Power sebagai variabel independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0 tahun, dan nilai maksimum sebesar 36 tahun. Nilai rata rata dari variabel adalah 4,5793, dengan standar deviasi sebesar 5,37958.

Pengungkapan ESG menunjukkan nilai minimum sebesar 0,16, dan nilai maksimum sebesar 0,91. Nilai rata rata variabel ini adalah 0,4782 dengan standar deviasi sebesar 0,15399.

Kinerja keuangan menghasilkan nilai minimum sebesar 0,49, dan



nilai maksimum sebesar 34,33. Nilai rata rata sebesar 10,4059 dengan standar deviasi sebesar 7,01294.

*Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai minimum sebesar 0,69, dan nilai maksimum sebesar 0,93. Nilai rata rata variabel ini sebesar 0,8009 dengan standar deviasinya sebesar 0,05670.

Ukuran perusahaan (size) sebagai variabel kontrol menunjukkan nilai minimum sebesar 24,94, dan nilai maksimum sebesar 32,16. Nilai rata rata variabel sebesar 29,0132 dengan standar deviasinya sebesar 1,64016.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

**Tabel 4. Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov**

Normalitas	N	Unstandarized Residual	Kesimpulan
Asymp.sig (2-tailed)	145	0,200	Terdistribusi Normal

Berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,2. Hal ini menunjukkan  $0,2 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
CEO Tenure	0,004	261,192	Terjadi multikolinieritas
ESG	0,005	221,964	Terjadi multikolinieritas
ROA	0,004	232,733	Terjadi multikolinieritas
GCG	0,057	17,680	Terjadi multikolinieritas
CEO_GCG	0,004	268,416	Terjadi multikolinieritas
ESG_GCG	0,005	218,348	Terjadi multikolinieritas
ROA_GCG	0,004	236,924	Terjadi multikolinieritas
SIZE	0,887	1,128	Tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan variabel independen yang dipengaruhi variabel moderasi mempunyai nilai tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ . Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi mengalami gejala multikolinieritas, kecuali variabel kontrol dengan nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$  tidak ada gejala multikolinieritas.



Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Sebelum Perbaikan)

Durbin	dU	dL	4-dU	4-dL	Keterangan
Watson	1,612	1,7856	1,6724	2,2144	2,3276

Hasil pengujian autokorelasi menggunakan statistik *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 1,612. Untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* pada tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah observasi  $n = 145$  dan jumlah variabel independen  $k = 4$ , diperoleh nilai batas bawah  $dL = 1,6724$  dan batas atas  $dU = 1,7856$ . Setelah menghitung  $4-dL$  dan  $4-dU$ , diperoleh nilai masing-masing 2,3276 dan 2,2144. Dengan hasil tersebut, kesimpulannya adalah bahwa model regresi yang digunakan masih menunjukkan gejala autokorelasi, karena nilai *Durbin-Watson* tidak memenuhi kriteria  $dU < d < 4-dU$ .

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi (Setelah Perbaikan)

Autokorelasi +	Ragu-ragu dL	Tidak Autokorelasi (DW)	Ragu-ragu dU	Autokorelasi -
0	1,6724	1,7856	1,956	2,2144

Berdasarkan hasil perbandingan autokorelasi, nilai *Durbin Watson* lebih besar dari  $dL$  dan  $dU$ , maka tidak terjadi autokorelasi. Adapun kriteria pengujian  $dU < d < 4-dU$ , terbukti dalam hasil uji autokorelasi penelitian ini dimana  $1,7856 < 1,956 < 2,2144$ , maka penelitian ini dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
CEO_Tenure	0,150	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ESG	0,706	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA	0,547	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
GCG	0,509	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
CEO_GCG	0,186	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ESG_GCG	0,594	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA_GCG	0,453	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SIZE	0,944	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas



Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa semua variabel bebas di atas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dengan demikian dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedasitas.

### Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien $\beta$	Sig (one-tail)	Keputusan
(Constant)		-0,283	0,253	
CEO Tenure	+	-0,030	0,129	H1 Ditolak
ESG	-	2,104	0,005	H2 Ditolak
ROA	-	-0,036	0,018	H3 Diterima
GCG	-	0,100	0,435	H4 Ditolak
CEO_GCG	-	0,036	0,120	H5 Ditolak
ESG_GCG	-	-2,763	0,003	H6 Ditolak
ROA_GCG	-	0,051	0,008	H7 Ditolak
SIZE		0,001	0,422	
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>		0,237		
<b>F hitung</b>		6,548		
<b>F Sig</b>		<0,001		

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dirumuskan persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$TA = -0,283 - 0,030\text{CEO} + 2,104\text{ESG} - 0,036\text{ROA} + 0,100\text{GCG} + 0,036\text{CEO*GCG} - 2,763\text{ESG*GCG} + 0,051\text{ROA*GCG}$$

### Hasil Uji Kelayakan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05, hasil menunjukkan F hitung sebesar 6,548, dimana lebih besar dari F tabel 2,44. Probabilitas yang diperoleh adalah <0,001, yang juga kurang dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa variabel CEO power, pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara simultan.

### Hasil Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-square) adalah 0,237 (23,7%), menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 23,7% variasi atas variabel *Tax avoidance*, sementara 76,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.



## Hasil Uji Parsial (Uji T)

CEO Power tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* dengan signifikansi 0,129 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H1 ditolak. Pengungkapan ESG menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan signifikansi 0,005 yang kurang dari 0,05, hal ini tidak mendukung hipotesis H2 yang menyatakan pengungkapan ESG berpengaruh negatif, sehingga hipotesis H2 ditolak. Kinerja Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan dengan signifikansi 0,018 yang kurang dari 0,05, sehingga hipotesis H3 diterima. *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,435 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H4 ditolak. Interaksi antara GCG dan CEO Power tidak memperlemah pengaruh positif dengan signifikansi 0,120 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H5 ditolak. Interaksi antara GCG dan Pengungkapan ESG tidak memperkuat pengaruh negatif meskipun signifikansi 0,003 yang kurang dari 0,05 hal ini dikarenakan hasil koefisien hipotesis H2 yang positif, sehingga hipotesis H6 ditolak. Terakhir, interaksi antara GCG dan Kinerja Keuangan juga tidak memperkuat pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* meskipun signifikansi 0,008 yang kurang dari 0,05. Hal ini karena koefisien hipotesis 7 mengarah positif, sehingga hipotesis H7 juga ditolak.

### CEO Power

Penelitian menunjukkan bahwa CEO Power tidak berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zunianto, dkk (2024), menyatakan bahwa kekuasaan CEO dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Noviawan & Utamie (2020), yang menunjukkan bahwa managerial tenure tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Beban pembayaran pajak tidak menjadi fokus utama seorang Pimpinan. CEO dengan masa jabatan pendek lebih fokus pada peningkatan kinerja untuk mempertahankan posisi mereka daripada melakukan *Tax avoidance*.

### Pengungkapan ESG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Meskipun ada pengaruh signifikan, arah koefisiennya tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh negatif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dapat mengalihkan perhatian dari praktik perpajakan, sehingga hipotesis ini ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Pratiwi, dkk, (2024) yang menyatakan meskipun ESG menekankan pada tata kelola yang baik, praktik ESG biasanya tidak secara eksplisit mencakup kebijakan spesifik tentang penghindaran pajak.

### Kinerja Keuangan



Kinerja keuangan terbukti berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Sembiring dan Sa'adah (2021), dan Amelia dan Purwaningsih (2024), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka.

#### **Good Corporate Governance (GCG)**

GCG tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Penelitian Winata (2014) menunjukkan bahwa meskipun GCG bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

#### **Interaksi GCG dengan CEO Power**

Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian yang dilakukan Nursavitri (2023), mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan atau dengan kata lain, tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat memperlemah atau membatasi seorang CEO dengan kekuasaan signifikan dalam memilih peluang lebih tinggi dalam mengambil keputusan perusahaan yang cenderung memaksimalkan keuntungan perusahaan, termasuk menghindari pajak secara agresif.

#### **Interaksi GCG dengan Pengungkapan ESG**

GCG tidak memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance*. Meskipun interaksi antara keduanya menunjukkan pengaruh negatif secara statistik, hal ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi antara pengungkapan ESG dan penerapan GCG mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari melakukan praktik.

#### **Interaksi GCG dengan Kinerja Keuangan**

GCG tidak mampu memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang ditemukan Sunarsih & Handayani, 2018 yang menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bisa menyebabkan peningkatan nilai perusahaan dimana perusahaan akan terhindar dari kegiatan ilegal, termasuk yang berkaitan dengan pajak. Kemudian Amelia dan Purwaningsih (2024), menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Faktor yang diasumsikan menyebabkan tidak adanya moderasi yang dilakukan oleh *Good Corporate Governance* terhadap pengaruh dari kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*, dimana GCG belum diterapkan mendalam, sehingga tidak menjadi pendorong dari para investor untuk melihat nilai GCG tersebut sebagai faktor yang digunakan untuk melakukan tekanan ke manajemen atas penghindaran pajak yang mereka lakukan.



## KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh CEO Power, pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* selama periode 2021 hingga 2023, dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO Power tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang sejalan dengan temuan Noviawan & Utamie (2020). Di sisi lain, pengungkapan ESG juga tidak menunjukkan dampak negatif terhadap penghindaran pajak, meskipun beberapa studi sebelumnya mengindikasikan sebaliknya. Kinerja keuangan terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membayar pajak lebih banyak.

Selanjutnya, GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan penelitian Hidayana (2017) yang menunjukkan bahwa GCG dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, GCG tidak mampu memperlemah pengaruh positif CEO power terhadap penghindaran pajak dan tidak mampu memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Namun, interaksi antara GCG dan pengungkapan ESG menunjukkan efek negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti penerapan prinsip GCG dapat membantu perusahaan untuk menghindari praktik tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan, seperti potensi bias dalam penggunaan variabel dummy pada pengukuran pengungkapan ESG dan GCG, serta terjadi multikolinieritas yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kinerja keuangan dalam keputusan perpajakan dan perlunya penerapan praktik GCG dan ESG yang baik untuk menekan niat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mencakup eksplorasi sektor lain untuk perbandingan hasil, serta penggunaan metode pengukuran yang lebih tepat untuk mengurangi bias. Hal ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di berbagai konteks industri.

## REFERENSI

- Amalia, R., & Purwaningsih, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(3). <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2463>



- ASEAN Capital Market Forum. (2023). 2023 ASEAN Corporate Governance Scorecard. <https://www.theacmf.org/initiatives/corporate-governance/2023-asean-corporate-governance-scorecard>
- Ghazali, A., Studi Manajemen Keuangan, P., Negeri Jakarta, P., & Studi Manajemen Keuangan Politeknik Negeri Jakarta JI GA Siwabessy, P. D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. (2021). The GRI Standards A GUIDE FOR POLICY MAKERS.
- Hidayana. 2017. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. <https://scholar.google.co.id>.
- IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance). (2009). Definisi dari konsep Good Corporate Governance.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305 360. <https://scholar.google.co.id>.
- Krisna, P. V. A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan . Diponegoro Journal of Accounting, 13(4).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 1-20. DOI: 10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006
- Maas, N. (2022). Moderating the relationship between ESG performance and Tax Avoidance National culture, industry sensitivity, and board effectiveness as moderating variables.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Noviawan, A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure terhadap Tax Avoidance. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 3 (1), 1 - 14.
- Nurlaelly, H., & Dewi, R. R. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty and Corporate Reputation terhadap Tax Avoidance . 45(617), 589–590.
- Nursavitri, M. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek



- Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Trisakti, 4(1). <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet>.
- Oktiani, Feronika & Sanulika, Aris. (2024). Implementasi Strategi Bisnis dan Pengungkapan Esg terhadap Tax Avoidance. JAKIA Multiparadigma, 1(1).
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2024). Revenue Statistic in Asia Pacific. [https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2024\\_e4681bfa-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2024_e4681bfa-en.html)
- Pratiwi, Novia Indri., Fuadah, Luk Luk., Yunisvita. (2024). Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Management Studies and Entrepreneurship Journal, 5(2), 7772-7783.
- Rankin et al. (2018). Contemporary Issues In Accounting Second Edition. Jhon Wiley and Sons Ltd, Australia.
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol. 14(2).
- Spence, M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
- Tristanti, Ike Alvinurnita., Aisyaturrahmi. (2023). Studi Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance. Accounting and Management Journal, 7(1).
- Yawika, M. K., & Handayani, S. (2019). The Effect of ESG Performance on Economic Performance in the High Profile Industry in Indonesia. Journal of International Business and Economics, 7(2), 112–121. <https://doi.org/10.15640/jibe.v7n2a12>
- Yulista, V., & Herawaty, V. (2024). Peran Karakteristik Ceo dalam Memoderasi Pengaruh Antara Esg dan Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Keuangan. Journal of Syntax Literate, 9(10).
- Zunianto, A. P. W., Narsa, N. P. D. R. H., & Lukita, C. (2024). CEO Power and Tax Avoidance: An empirical study of manufacturing companies in Indonesia. The Indonesian Accounting Review, 14(1), 11-23.

